



Mekanisme Pengelolaan Utang Negara dan Implikasinya terhadap Perekonomian Nasional

Dewi Yanti^{1*}, Junita Mawartina², Heti Sarlini³, Wahjoe Pangestoeti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111

Email: dyanti@student.umrah.ac.id¹, junitamawartina16@gmail.com²,
hetisarlini530@gmail.com³, wahjoepangestoeti@umrah.ac.id⁴

Abstract. *The mechanism of state debt management is a process involving fiscal and monetary policies to regulate the issuance, use, and repayment of state debt. In its management, the government usually uses instruments such as bonds, bilateral loans, and multilateral loans to finance the budget deficit. State debt can be used to fund infrastructure projects, health, education, and other important sectors, but its management must be careful so as not to burden the economy. One important aspect of debt management is maintaining the debt ratio to Gross Domestic Product (GDP) so that it remains under control. If state debt increases significantly without being balanced by economic growth, it can pose a risk of inflation, a larger budget deficit, and a reduction in market confidence in the government's ability to repay debt. On the other hand, good debt management can encourage economic growth by financing productive projects that increase competitiveness and public welfare. Strict supervision of debt allocation and transparency in the use of funds are essential to avoid misuse and increase the effectiveness of debt management. In addition, the role of international institutions such as the IMF and the World Bank is also crucial in providing technical advice and support for sustainable debt management policies.*

Keywords: *State Debt Management, Fiscal Policy, Debt to GDP Ratio, Infrastructure, Economic Growth.*

Abstrak. Mekanisme pengelolaan utang negara merupakan proses yang melibatkan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatur penerbitan, penggunaan, serta pelunasan utang negara. Dalam pengelolaannya, pemerintah biasanya menggunakan instrumen seperti obligasi, pinjaman bilateral, dan multilateral untuk membiayai defisit anggaran. Utang negara dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya, namun pengelolaannya harus hati-hati agar tidak membebani perekonomian. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan utang adalah menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) agar tetap terkendali. Jika utang negara meningkat secara signifikan tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, maka dapat menimbulkan risiko inflasi, defisit anggaran yang lebih besar, serta pengurangan kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam membayar utang. Di sisi lain, pengelolaan utang yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membiayai proyek-proyek produktif yang meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan yang ketat terhadap alokasi utang serta transparansi dalam penggunaan dana sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan utang. Selain itu, peran lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga sangat krusial dalam memberikan nasihat teknis serta dukungan terhadap kebijakan pengelolaan utang yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pengelolaan Utang Negara, Kebijakan Fiskal, Rasio Utang terhadap PDB, Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan utang negara menjadi salah satu topik yang semakin penting dalam konteks perekonomian nasional. Dengan adanya dinamika global yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, pengelolaan utang negara menjadi instrumen yang sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti banyak negara lainnya, Indonesia seringkali dihadapkan pada situasi di mana pemasukan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, sehingga utang menjadi salah satu solusi.

Utang negara pada dasarnya digunakan untuk membiayai defisit anggaran, mendukung

Received: Desember 11, 2024 Revised: Desember 25, 2024 Accepted: Januari 08, 2025 Published: Januari 10, 2025

pembiayaan proyek infrastruktur, dan meningkatkan sektor-sektor penting lainnya. Namun, pengelolaan utang yang tidak hati-hati dapat berpotensi membawa dampak negatif bagi perekonomian, seperti ketidakstabilan finansial dan krisis ekonomi yang dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat (Abubakar & Handayani, 2021).

Salah satu tantangan dalam pengelolaan utang negara adalah menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) agar tetap pada level yang aman. Rasio utang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesulitan dalam membayar kewajiban utang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan beban fiskal pemerintah dan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa utang yang diterbitkan digunakan untuk pembiayaan yang produktif dan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kembali kewajiban utang tersebut. Salah satu sektor yang sering mendapat pembiayaan melalui utang adalah sektor infrastruktur, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian jangka panjang (Meirizal et al., 2024).

Selain itu, faktor eksternal seperti krisis global, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian ekonomi global turut mempengaruhi mekanisme pengelolaan utang negara. Misalnya, dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah demi menangani krisis kesehatan dan perekonomian yang ditimbulkan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal yang ekspansif, termasuk peningkatan utang, menjadi salah satu solusi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Namun, pengelolaan utang yang buruk di tengah situasi yang tidak pasti dapat memperburuk kondisi fiskal negara dalam jangka panjang (Feranika & Haryati, 2020).

Peningkatan utang negara juga tidak terlepas dari implikasi sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Utang yang semakin besar berpotensi meningkatkan beban pajak atau memotong anggaran untuk program sosial penting. Oleh karena itu, dalam mengelola utang negara, perlu dilakukan evaluasi yang mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi di masa depan (Yusni, 2022).

Di sisi lain, pengelolaan utang negara juga berhubungan erat dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Kebijakan moneter yang bijaksana dapat membantu mengurangi tekanan inflasi yang timbul akibat utang yang meningkat, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan suku bunga. Dalam konteks Indonesia, kebijakan Bank Indonesia dalam

mengelola suku bunga dan cadangan devisa sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter harus terkoordinasi dengan baik untuk menciptakan kestabilan perekonomian nasional (Juliani, 2020).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan utang negara adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan utang dan bagaimana utang tersebut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Transparansi dalam penggunaan utang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran negara. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan utang negara, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa utang dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Fajrina et al., 2020).

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan fiskal dan pengelolaan utang negara, perlu juga diperhatikan peran lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Lembaga-lembaga ini memberikan dukungan teknis dan finansial yang penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengelola utang secara efektif. Di sisi lain, pinjaman dari lembaga-lembaga internasional ini juga harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menambah beban utang negara yang berlebihan (Ahyani & Nurhasanah, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan utang negara memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pengelolaan utang negara tidak hanya berfokus pada pembiayaan defisit anggaran, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan fiskal dan pemenuhan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor produktif lainnya memerlukan perhatian serius agar utang yang dikeluarkan dapat mendatangkan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang efisien dan transparan dalam penggunaan utang negara, serta mengevaluasi dampak dari kebijakan utang terhadap sektor-sektor ekonomi yang lebih luas (Rahayu & Sugianto, 2020).

Secara keseluruhan, pengelolaan utang negara adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, penting untuk merancang kebijakan utang yang seimbang, mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi yang mungkin timbul, serta melibatkan lembaga-lembaga internasional untuk memastikan

keberhasilan pengelolaan utang. Dengan pengelolaan yang hati-hati dan bijaksana, utang negara dapat menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tanpa menambah beban yang berlebihan pada perekonomian nasional (Leylana & Sarjito, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan utang negara merupakan isu yang sangat krusial dalam teori ekonomi dan kebijakan fiskal. Sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi negara yang menghadapi defisit anggaran, utang negara menjadi instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Namun, dalam teori ekonomi, ada banyak perspektif yang menjelaskan pengaruh dan implikasi dari pengelolaan utang terhadap perekonomian nasional. Salah satu perspektif yang sering dikemukakan adalah teori Keynesian yang menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam masa resesi. Menurut teori ini, utang negara bisa menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan permintaan agregat, khususnya pada saat perekonomian sedang mengalami kontraksi. Kebijakan fiskal yang ekspansif, melalui pembiayaan utang, dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Meirizal et al., 2024).

Namun, pengelolaan utang negara tidak bisa dipandang hanya dari perspektif Keynesian saja. Ada teori lain yang lebih menekankan pada risiko dan ketahanan fiskal, seperti teori utang berkelanjutan yang berfokus pada kemampuan negara untuk membayar utang tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Menurut teori ini, utang yang berlebihan dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian, seperti peningkatan suku bunga, inflasi, atau bahkan krisis keuangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola utang negara secara hati-hati dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan negara dalam membayar kewajiban utangnya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menjadi indikator utama dalam menilai keberlanjutan utang negara. Rasio utang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan beban fiskal yang besar, yang pada gilirannya akan mengurangi daya saing ekonomi dan membebani sektor-sektor produktif dalam perekonomian (Juliani, 2020).

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan utang negara juga dipengaruhi oleh berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah Indonesia sering menggunakan utang sebagai salah satu cara untuk membiayai defisit anggaran negara, terutama pada saat perekonomian menghadapi tekanan, seperti yang terjadi pada masa

pandemi COVID-19. Kebijakan stimulus yang diterapkan selama pandemi, yang melibatkan peningkatan belanja pemerintah dan pembiayaan utang, menunjukkan bagaimana utang negara digunakan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas perekonomian di tengah krisis. Kebijakan ini juga mencerminkan penerapan teori Keynesian dalam konteks krisis, di mana pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan permintaan domestik dan membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional (Abubakar & Handayani, 2021).

Namun, kebijakan ekspansif yang melibatkan peningkatan utang negara harus diimbangi dengan pengelolaan yang hati-hati agar tidak menambah beban ekonomi jangka panjang. Di sinilah pentingnya peran lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan pengelolaan utang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pengelolaan yang tidak efisien dapat mengarah pada masalah besar, seperti inflasi yang tinggi, penurunan nilai tukar mata uang, atau ketidakmampuan pemerintah dalam membayar utang. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan utang yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa utang digunakan untuk pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan (Yusni, 2022).

Selain teori-teori ekonomi yang lebih umum, pengelolaan utang negara juga dipengaruhi oleh konteks hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan utang negara sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal yang fleksibel dalam menghadapi situasi darurat, seperti pandemi COVID-19. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan melalui undang-undang ini memberi ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan utang negara, namun dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kestabilan sistem keuangan dan perekonomian nasional (Undang-Undang, P. P., & INDONESIA, P. R., 2020).

Pengelolaan utang negara yang baik tidak hanya melibatkan kebijakan fiskal, tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan moneter yang tepat. Dalam teori ekonomi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal saling berinteraksi dan harus dijalankan secara bersamaan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang optimal. Dalam hal ini, Bank Indonesia berperan penting dalam mengelola suku bunga, cadangan devisa, dan nilai tukar, yang semuanya dapat memengaruhi kemampuan negara dalam mengelola utang. Kebijakan moneter yang longgar,

seperti penurunan suku bunga, dapat mempermudah pembayaran utang negara, namun harus tetap memperhatikan inflasi dan stabilitas nilai tukar (Feranika & Haryati, 2020).

Selain itu, dalam pengelolaan utang negara, penting untuk memperhatikan implikasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Utang negara yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan proyek produktif dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, seperti peningkatan daya saing dan lapangan pekerjaan. Namun, utang yang digunakan untuk tujuan konsumtif atau yang tidak produktif berpotensi memperburuk kondisi fiskal dan merugikan perekonomian di masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan utang negara harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa utang yang diterbitkan digunakan untuk tujuan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi jangka panjang (Fajrina et al., 2020).

Terkait dengan hal ini, teori optimalisasi pengelolaan zakat juga bisa menjadi perspektif yang menarik dalam kajian pengelolaan utang negara, khususnya dalam kaitannya dengan distribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi. Meskipun zakat tidak dapat sepenuhnya menggantikan utang negara, namun optimalisasi pengelolaan zakat dapat membantu meningkatkan kapasitas fiskal negara, khususnya dalam hal pendanaan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang efektif dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan perekonomian nasional (Fajrina et al., 2020).

Dalam kesimpulannya, pengelolaan utang negara dan implikasinya terhadap perekonomian nasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Teori-teori ekonomi yang mendasari kebijakan fiskal dan moneter harus diterapkan dengan bijak agar utang negara tidak menjadi beban yang membebani perekonomian. Kebijakan yang mengarah pada pengelolaan utang yang transparan, efisien, dan berkelanjutan akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal jangka panjang. Di sisi lain, pengelolaan yang buruk atau tidak hati-hati dapat membawa risiko besar yang dapat mengganggu perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat (Leylana & Sarjito, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik pengelolaan utang negara dan implikasinya terhadap perekonomian nasional. Studi pustaka ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep teoretis dan praktik yang terkait dengan pengelolaan utang

negara, serta dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Dengan menggunakan sumber-sumber pustaka yang mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen kebijakan terkait, penelitian ini berusaha untuk menganalisis berbagai perspektif yang ada dalam literatur yang tersedia.

Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara langsung, melainkan lebih menekankan pada pemahaman teori-teori yang telah ada dan aplikasinya dalam konteks perekonomian Indonesia. Peneliti melakukan telaah terhadap berbagai artikel ilmiah, buku referensi, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan pengelolaan utang negara, baik yang bersifat ekonomi, fiskal, maupun hukum. Proses ini melibatkan pemilihan literatur yang teruji kualitasnya, serta mengidentifikasi berbagai konsep, kebijakan, dan teori yang dapat mendukung pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang diteliti. Studi pustaka ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi gap dalam penelitian yang ada dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan dari literatur yang ada.

Dalam melakukan studi pustaka, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis temuan-temuan dari sumber-sumber literatur yang ada secara kritis dan sistematis. Peneliti menilai relevansi informasi, mengkritisi metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu, dan menganalisis kesimpulan yang dihasilkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pengelolaan utang negara serta implikasinya terhadap perekonomian. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan, peluang, dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan utang negara, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pengelolaan utang negara merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perekonomian nasional. Utang negara, yang sering kali digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan menciptakan lapangan kerja, berfungsi sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pengelolaan utang yang tidak tepat dapat berimplikasi buruk bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme pengelolaan utang negara diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Utang negara pada dasarnya adalah kewajiban yang harus

dibayar kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang meminjamkan dana, yang meliputi lembaga internasional, negara lain, maupun investor di pasar global.

Mekanisme pengelolaan utang negara di Indonesia melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dengan perencanaan kebutuhan utang. Dalam hal ini, pemerintah akan merencanakan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk membiayai anggaran negara, terutama ketika defisit anggaran terjadi. Utang ini kemudian dikelola oleh Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pembayaran utang ini mencakup bunga yang harus dibayar secara periodik, serta pokok utang yang harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan. Mekanisme ini membutuhkan perhitungan yang cermat, karena kemampuan negara untuk membayar utang tergantung pada penerimaan negara yang diperoleh dari pajak dan pendapatan lainnya, serta kemampuan negara untuk mengelola defisit anggaran secara efisien.

Selain itu, utang negara juga dapat berasal dari dua sumber utama, yakni utang domestik dan utang luar negeri. Utang domestik, yang diterbitkan dalam mata uang rupiah, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam negeri tanpa tergantung pada fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sementara itu, utang luar negeri yang diterbitkan dalam mata uang asing, seperti dolar AS, rentan terhadap risiko fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu, pengelolaan utang negara harus memerhatikan baik utang domestik maupun luar negeri untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengelolaan utang luar negeri juga membutuhkan strategi yang matang dalam mengelola nilai tukar dan memastikan bahwa utang yang diambil benar-benar digunakan untuk proyek yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi negara.

Implikasi dari pengelolaan utang negara terhadap perekonomian nasional sangat beragam, tergantung pada bagaimana utang tersebut digunakan dan dikelola. Salah satu implikasi positif dari utang negara adalah jika utang tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang produktif dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, utang yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan cara ini, utang dapat menjadi pendorong bagi perekonomian jangka panjang, dan dalam banyak kasus dapat meningkatkan pendapatan negara yang pada gilirannya membantu pembayaran kembali utang tersebut.

Namun, pengelolaan utang yang tidak hati-hati dapat berisiko membawa dampak negatif bagi perekonomian. Salah satu dampak negatif yang dapat timbul adalah meningkatnya beban utang yang harus ditanggung oleh negara. Ketika utang semakin menumpuk dan pembayaran bunga utang meningkat, anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk

pembiayaan pembangunan dapat teralihkan untuk membayar utang. Hal ini dapat mengurangi kapasitas fiskal negara untuk membiayai program-program pembangunan yang esensial, dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan beban utang juga dapat menyebabkan negara terjebak dalam siklus utang yang sulit untuk dihentikan, sehingga mempengaruhi kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai keberlanjutan pengelolaan utang adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini mengukur seberapa besar utang suatu negara dibandingkan dengan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut dalam periode tertentu. Rasio utang yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki beban utang yang besar relatif terhadap kapasitas perekonomiannya. Oleh karena itu, pengelolaan utang yang baik harus mempertimbangkan batasan-batasan rasio ini agar utang tidak melebihi kemampuan negara untuk membayar utangnya di masa depan. Jika rasio utang terhadap PDB terlalu tinggi, hal ini dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap kemampuan negara dalam membayar utang dan berisiko meningkatkan biaya pinjaman di masa depan.

Dalam pengelolaan utang negara, penting bagi pemerintah untuk memiliki strategi yang jelas terkait dengan pengelolaan risiko. Misalnya, pengelolaan risiko nilai tukar bagi utang luar negeri harus dilakukan dengan hati-hati agar fluktuasi mata uang asing tidak mempengaruhi pembayaran utang secara signifikan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan hedging atau lindung nilai untuk melindungi negara dari gejolak nilai tukar. Selain itu, penting juga untuk mengelola jatuh tempo utang dengan bijak, agar negara tidak menghadapi lonjakan pembayaran utang yang membebani anggaran negara. Pengelolaan risiko yang baik akan memastikan bahwa negara dapat memenuhi kewajibannya tanpa merusak stabilitas ekonomi.

Implikasi pengelolaan utang negara terhadap inflasi juga perlu diperhatikan. Ketika utang negara dibiayai dengan mencetak uang baru, hal ini dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inflasi. Inflasi yang tinggi dapat merugikan perekonomian karena dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menyebabkan ketidakstabilan harga. Oleh karena itu, pengelolaan utang yang melibatkan kebijakan moneter yang hati-hati sangat penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memiliki peran kunci dalam mengelola kebijakan suku bunga dan likuiditas yang berhubungan dengan utang negara.

Di sisi lain, pengelolaan utang negara juga memiliki implikasi terhadap stabilitas nilai tukar mata uang. Ketika negara mengeluarkan utang luar negeri dalam jumlah besar,

permintaan akan mata uang asing untuk pembayaran utang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Jika permintaan terhadap mata uang asing meningkat, nilai tukar rupiah dapat terdepresiasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya pembayaran utang dalam mata uang asing. Depresiasi mata uang juga dapat mempengaruhi impor barang dan bahan baku, serta mengarah pada inflasi yang lebih tinggi, yang dapat merugikan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan utang luar negeri.

Mekanisme pengelolaan utang negara yang efektif juga melibatkan keterbukaan dan transparansi dalam laporan utang. Pemerintah harus secara rutin menginformasikan kepada publik mengenai jumlah utang negara, struktur utang, serta penggunaan dana yang dipinjam. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memberikan keyakinan kepada investor dan masyarakat bahwa utang negara dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang produktif. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana utang negara digunakan untuk pembangunan, serta risiko yang terkait dengan utang tersebut.

Secara keseluruhan, pengelolaan utang negara yang baik sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa utang negara digunakan untuk tujuan yang jelas dan produktif, serta dikelola dengan hati-hati agar tidak menambah beban perekonomian. Pengelolaan yang buruk dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, sementara pengelolaan yang baik dapat memperkuat perekonomian dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan utang negara harus terus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia.

Pengelolaan utang negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengelolaan utang negara dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan kajian pustaka, pengelolaan utang negara di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan fiskal, kondisi makroekonomi, serta kebijakan internasional yang berhubungan dengan utang negara. Salah satu implikasi terbesar dari pengelolaan utang adalah dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, berusaha mengoptimalkan penggunaan utang untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Abubakar & Handayani, 2021).

Secara teori, utang negara berfungsi sebagai instrumen untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi ketika belanja negara lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Dalam kondisi normal, utang negara dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Namun, jika pengelolaan utang tidak hati-hati, utang dapat berbalik menjadi beban fiskal yang berat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan utang negara yang baik memerlukan pemantauan yang ketat terhadap rasio utang terhadap PDB serta memastikan bahwa utang yang diambil digunakan untuk investasi produktif, bukan untuk pengeluaran konsumtif yang tidak mendukung pertumbuhan jangka panjang (Juliani, 2020). Ini mencerminkan pandangan teori Keynesian yang menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, terutama dalam masa krisis.

Implikasi dari pengelolaan utang negara yang buruk dapat terlihat pada tingginya rasio utang terhadap PDB yang dapat menambah beban negara dalam membayar bunga utang. Hal ini juga dapat menyebabkan negara kesulitan dalam menarik investasi asing, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, utang negara yang digunakan dengan bijak dan efisien dapat mendukung program-program pembangunan yang mendatangkan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor yang mendukung daya saing ekonomi nasional (Meirizal et al., 2024). Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat menentukan efektivitas pengelolaan utang negara. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi, yang sebagian besar didanai melalui utang (Feranika & Haryati, 2020).

Berdasarkan studi ini, penting untuk memahami bahwa pengelolaan utang negara juga terkait erat dengan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang mengatur suku bunga dan stabilitas nilai tukar memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan utang negara. Suku bunga yang rendah dapat memperkecil beban pembayaran bunga utang, sementara suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan biaya utang dan memperburuk defisit fiskal. Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membayar utang luar negeri. Oleh karena itu, pengelolaan utang negara harus dilakukan dengan memperhatikan kebijakan moneter yang kondusif bagi

stabilitas ekonomi (Leylana & Sarjito, 2024). Dalam konteks Indonesia, kebijakan Bank Indonesia yang mendukung kebijakan fiskal pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa utang negara dapat dikelola dengan baik tanpa menambah beban ekonomi yang berlebihan.

Implikasi dari kebijakan fiskal yang melibatkan peningkatan utang negara juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap inflasi. Ketika pemerintah meminjam uang untuk membiayai defisit anggaran, hal ini bisa meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Jika pengelolaan uang yang beredar tidak terkontrol, hal ini dapat memicu inflasi yang tinggi, yang akan merugikan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan utang harus diimbangi dengan pengendalian inflasi yang ketat agar tidak menurunkan daya beli masyarakat dan merusak kestabilan ekonomi (Feranika & Haryati, 2020). Inflasi yang tinggi juga dapat merusak kredibilitas negara di mata investor, yang pada gilirannya akan memperburuk kemampuan negara dalam mengelola utang. Dalam hal ini, stabilitas harga sangat berperan penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian negara.

Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam mengelola utang negara adalah kebijakan stimulus fiskal yang dipakai untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut melibatkan penggunaan utang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dan mendanai program-program pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk membantu pelaku usaha yang terdampak pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi yang cepat (Abubakar & Handayani, 2021). Di satu sisi, kebijakan tersebut berhasil meredakan dampak ekonomi dari pandemi, tetapi di sisi lain, penggunaan utang yang sangat besar berpotensi memperburuk beban fiskal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa utang yang diambil digunakan untuk tujuan yang produktif dan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Selain kebijakan fiskal dan moneter, pengelolaan utang negara juga dipengaruhi oleh aspek hukum yang mengatur tata kelola utang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk meningkatkan utang negara dalam situasi krisis. Namun, pengelolaan utang juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan perekonomian. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pengawas dan audit memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa utang negara dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional

(Yusni, 2022). Keberhasilan pengelolaan utang negara tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan utang negara, pengelolaan zakat juga dapat berperan dalam mendukung stabilitas fiskal. Optimalisasi pengelolaan zakat yang efektif dapat meningkatkan kapasitas fiskal negara dalam mendanai program-program kesejahteraan sosial yang penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Meskipun zakat tidak dapat sepenuhnya menggantikan utang negara, namun pengelolaan zakat yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia (Fajrina et al., 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan ekonomi negara, keberagaman sumber pembiayaan perlu diperhatikan agar dapat menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan fiskal negara.

Secara keseluruhan, pengelolaan utang negara di Indonesia memiliki implikasi yang besar terhadap perekonomian nasional. Pengelolaan yang hati-hati dan efisien akan membantu negara dalam mencapai tujuan pembangunan tanpa membebani perekonomian di masa depan. Namun, pengelolaan utang yang buruk atau tidak efisien dapat menimbulkan beban fiskal yang besar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pengelolaan utang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, moneter, sosial, dan hukum yang saling berinteraksi dalam sistem perekonomian negara (Ahyani & Nurhasanah, 2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan utang negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengelolaan utang negara dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan kajian pustaka, pengelolaan utang negara di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan fiskal, kondisi makroekonomi, serta kebijakan internasional yang berhubungan dengan utang negara. Salah satu implikasi terbesar dari pengelolaan utang adalah dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, berusaha mengoptimalkan penggunaan utang untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Abubakar & Handayani, 2021).

Secara teori, utang negara berfungsi sebagai instrumen untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi ketika belanja negara lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Dalam kondisi normal, utang negara dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Namun, jika pengelolaan utang tidak hati-hati, utang dapat berbalik menjadi beban fiskal yang berat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan utang negara yang baik memerlukan pemantauan yang ketat terhadap rasio utang terhadap PDB serta memastikan bahwa utang yang diambil digunakan untuk investasi produktif, bukan untuk pengeluaran konsumtif yang tidak mendukung pertumbuhan jangka panjang (Juliani, 2020). Ini mencerminkan pandangan teori Keynesian yang menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, terutama dalam masa krisis.

Implikasi dari pengelolaan utang negara yang buruk dapat terlihat pada tingginya rasio utang terhadap PDB yang dapat menambah beban negara dalam membayar bunga utang. Hal ini juga dapat menyebabkan negara kesulitan dalam menarik investasi asing, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, utang negara yang digunakan dengan bijak dan efisien dapat mendukung program-program pembangunan yang mendatangkan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor yang mendukung daya saing ekonomi nasional (Meirizal et al., 2024). Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat menentukan efektivitas pengelolaan utang negara. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi, yang sebagian besar didanai melalui utang (Feranika & Haryati, 2020).

Berdasarkan studi ini, penting untuk memahami bahwa pengelolaan utang negara juga terkait erat dengan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang mengatur suku bunga dan stabilitas nilai tukar memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan utang negara. Suku bunga yang rendah dapat memperkecil beban pembayaran bunga utang, sementara suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan biaya utang dan memperburuk defisit fiskal. Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membayar utang luar negeri. Oleh karena itu, pengelolaan utang negara harus dilakukan dengan memperhatikan kebijakan moneter yang kondusif bagi stabilitas ekonomi (Leylana & Sarjito, 2024). Dalam konteks Indonesia, kebijakan Bank

Indonesia yang mendukung kebijakan fiskal pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa utang negara dapat dikelola dengan baik tanpa menambah beban ekonomi yang berlebihan.

Implikasi dari kebijakan fiskal yang melibatkan peningkatan utang negara juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap inflasi. Ketika pemerintah meminjam uang untuk membiayai defisit anggaran, hal ini bisa meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Jika pengelolaan uang yang beredar tidak terkontrol, hal ini dapat memicu inflasi yang tinggi, yang akan merugikan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan utang harus diimbangi dengan pengendalian inflasi yang ketat agar tidak menurunkan daya beli masyarakat dan merusak kestabilan ekonomi (Feranika & Haryati, 2020). Inflasi yang tinggi juga dapat merusak kredibilitas negara di mata investor, yang pada gilirannya akan memperburuk kemampuan negara dalam mengelola utang. Dalam hal ini, stabilitas harga sangat berperan penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian negara.

Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam mengelola utang negara adalah kebijakan stimulus fiskal yang dipakai untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut melibatkan penggunaan utang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dan mendanai program-program pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk membantu pelaku usaha yang terdampak pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi yang cepat (Abubakar & Handayani, 2021). Di satu sisi, kebijakan tersebut berhasil meredakan dampak ekonomi dari pandemi, tetapi di sisi lain, penggunaan utang yang sangat besar berpotensi memperburuk beban fiskal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa utang yang diambil digunakan untuk tujuan yang produktif dan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Selain kebijakan fiskal dan moneter, pengelolaan utang negara juga dipengaruhi oleh aspek hukum yang mengatur tata kelola utang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk meningkatkan utang negara dalam situasi krisis. Namun, pengelolaan utang juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan perekonomian. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pengawas dan audit memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa utang negara dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional

(Yusni, 2022). Keberhasilan pengelolaan utang negara tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan utang negara, pengelolaan zakat juga dapat berperan dalam mendukung stabilitas fiskal. Optimalisasi pengelolaan zakat yang efektif dapat meningkatkan kapasitas fiskal negara dalam mendanai program-program kesejahteraan sosial yang penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Meskipun zakat tidak dapat sepenuhnya menggantikan utang negara, namun pengelolaan zakat yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia (Fajrina et al., 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan ekonomi negara, keberagaman sumber pembiayaan perlu diperhatikan agar dapat menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan fiskal negara.

Secara keseluruhan, pengelolaan utang negara di Indonesia memiliki implikasi yang besar terhadap perekonomian nasional. Pengelolaan yang hati-hati dan efisien akan membantu negara dalam mencapai tujuan pembangunan tanpa membebani perekonomian di masa depan. Namun, pengelolaan utang yang buruk atau tidak efisien dapat menimbulkan beban fiskal yang besar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pengelolaan utang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, moneter, sosial, dan hukum yang saling berinteraksi dalam sistem perekonomian negara (Ahyani & Nurhasanah, 2020).

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan utang negara memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional. Pengelolaan yang efektif dan efisien dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengelolaan yang buruk dapat memperburuk kondisi fiskal dan menambah beban negara dalam jangka panjang. Utang negara, ketika digunakan dengan bijak untuk mendanai proyek pembangunan yang produktif, dapat berfungsi sebagai alat untuk mempercepat kemajuan ekonomi. Namun, jika utang digunakan untuk pengeluaran konsumtif yang tidak mendukung pertumbuhan, maka utang tersebut justru akan menjadi beban yang sulit ditanggung oleh perekonomian.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan utang negara adalah menjaga keseimbangan antara pembiayaan defisit dan keberlanjutan fiskal. Kebutuhan untuk meminjam uang melalui utang sangatlah besar, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, yang menyebabkan defisit anggaran negara membengkak. Namun, apabila utang tidak dikelola

dengan hati-hati, rasio utang terhadap PDB dapat meningkat dengan cepat, yang pada gilirannya dapat menambah beban pembayaran bunga utang dan mengurangi fleksibilitas fiskal negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa utang yang diambil digunakan untuk proyek-proyek yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, kebijakan fiskal yang tepat sangat penting dalam mengoptimalkan pengelolaan utang negara. Penggunaan utang yang efektif akan lebih berdampak positif jika diimbangi dengan kebijakan pengelolaan yang hati-hati, seperti pengendalian inflasi, pengawasan ketat terhadap belanja negara, dan peningkatan kapasitas pengelolaan fiskal yang transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap utang yang diambil tidak hanya mengurangi defisit anggaran dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait dengan kebijakan fiskal yang berhubungan dengan pengelolaan utang negara, penting untuk memperhatikan peran kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral. Kebijakan suku bunga yang rendah dapat membantu mengurangi beban bunga utang, sementara kebijakan yang mendukung stabilitas nilai tukar akan mengurangi risiko fluktuasi yang dapat memperburuk utang luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan utang negara tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

Sebagai tambahan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang negara juga sangat diperlukan. Untuk memastikan bahwa utang digunakan dengan bijak, penting bagi lembaga-lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan utang negara. Selain itu, kebijakan yang memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia, yang pada gilirannya dapat mempermudah akses negara ke pasar utang internasional dengan biaya yang lebih rendah.

Saran yang dapat diberikan terkait dengan pengelolaan utang negara adalah perlunya penguatan kapasitas fiskal nasional untuk memitigasi risiko utang yang tinggi. Ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pajak dan diversifikasi sumber pendapatan negara, sehingga negara tidak terlalu bergantung pada utang untuk membiayai defisit anggaran. Selain itu, dalam upaya memperbaiki pengelolaan utang, perlu diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai struktur utang negara, terutama utang

luar negeri, agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal.

Pemerintah juga disarankan untuk terus mengoptimalkan penggunaan instrumen fiskal dan moneter yang dapat mendukung pemulihan ekonomi jangka panjang. Dalam hal ini, kebijakan yang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor produktif lainnya dapat dioptimalkan dengan bantuan utang negara yang dikelola dengan baik. Dengan demikian, meskipun utang negara tetap menjadi bagian penting dalam pembiayaan pembangunan, pengelolaan yang bijak akan memastikan bahwa utang tersebut tidak hanya menjadi beban, tetapi juga menjadi sumber daya yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

6. DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Kebijakan stimulus dampak COVID-19 melalui restrukturisasi kredit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. *RechtIdee*, 16(1), 88–111.
- Adinta, A. H., & Nur, M. R. T. (2020). Signifikansi wakaf dalam keuangan negara: Tinjauan ekonomi klasik dan kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 19–40.
- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran strategi politik Islam terhadap perekonomian di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43.
- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
- Bakti, S., & Hakim, L. N. (2024). Ekonomi biru dan kepemimpinan strategis: Mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Kalianda Halok Gagas*, 7(1), 1–18.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100–120.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dalam menghadapi dampak virus COVID-19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152.
- Firdaus, A. H., Listiyanto, E., Talattov, A. P., & Taufikurrahman, M. R. (2020). Kajian tengah tahun INDEF 2020: Menata arsitektur ekonomi pasca pandemi. *INDEF*.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110.

- Juliani, H. (2020). Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329–348.
- Kurniadi, T. (2020). Implementasi pemberian hibah pemerintah Indonesia kepada pemerintah/lembaga asing sebagai stimulus soft diplomacy. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(1), 01–14.
- Leylana, N., & Sarjito, A. (2024). Dampak pemekaran daerah terhadap pertahanan negara: Studi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 29–45.
- Meirizal, M. S., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). Teori ekonomi Keynesian mengenai inflasi dan pengaruhnya terhadap ekonomi modern. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 2433–2445.
- Nabila, M., & Idayu, F. N. (2024). Implikasi penerapan hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan pasar keuangan Islam di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 9–18.
- Pranowo, K. (2024). Dampak kebijakan unified budget terhadap PHLN dari tinjauan good governance: Studi kasus di Kementerian Pertanian. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 1(1), 64–74.
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi kebijakan dan diskriminasi pelarangan ekspor dan impor minyak kelapa sawit dan bijih nikel terhadap perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 373034.
- Roring, E. B., Athallah, R. A., Situmorang, C. I., Kumor, M. S. D., & Triadi, I. (2024). Perbandingan sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi terhadap stabilitas politik nasional. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 6(1).
- Undang-Undang, P. P. P., & INDONESIA, P. R. (2020). Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- YAI, G. S. T. I. E., & YAI, Y. S. T. I. E. (2022). Analisis faktor-faktor kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas serta implikasinya terhadap harga saham. *Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA)*, 9(1), 63–79.
- Yusni, M. (2022). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011 yang menghapus kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terhadap mekanisme penyelesaian utang piutang pada bank BUMN/BUMD. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 3(1), 48–59.